

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MISKIN DI DESA BANJARMASIN
KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
KABUPATEN TANGGAMUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Dakwah

Oleh

**Fiolita Nur Wulandari
1541020008
Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MISKIN DI DESA BANJARMASIN
KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT
KABUPATEN TANGGAMUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Dakwah



Oleh
Fiolita Nur Wulandari
1541020008
Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. H. MA. Achlami HS. MA

Pembimbing II : Hj. Mardiyah, S.Pd, M.Pd

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2020 M

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat mendapatkan bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, namun kurangnya pengetahuan, pendidikan dan ketidak berdayaan masyarakat membuat masyarakat jauh dari kata sejahtera. Keadaan seperti ini terjadi pada masyarakat di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat, dimana masyarakatnya masih banyak yang belum sejahtera oleh sebab itu pemerintah memberikan bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Penulis mengadakan penelitian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Banjarmasin ? 2. Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Banjarmasin ?, Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk Mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Banjarmasin ! 2. Untuk Mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Banjarmasin !. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 8 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis dengan metode induktif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, didapat temuan sebagai berikut : dalam pelaksanaan PKH ditentukan enam tahap seperti penetapan sasaran, penetapan lokasi, pertemuan awal serta validasi, penyaluran bantuan, pembentukan kelompok dan pemutahiran data. Selain itu dalam proses efektivitas PKH memenuhi beberapa tahapan seperti efektivitas, efisiensi, edukasi, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Kata kunci : Efektivitas, Program Keluarga Harapan (PKH)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fiolita Nur Wulandari
NPM : 1541020008
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak mengisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila ternyata dikemudian hari terdapat plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan

Fiolita Nur Wulandari
NPM. 1541020008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus

Nama : Fiolita Nur Wulandari

NPM : 1541020008

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam


Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

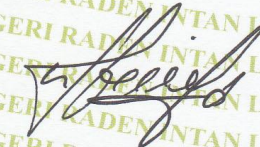
MENYETUJUI

Untuk diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

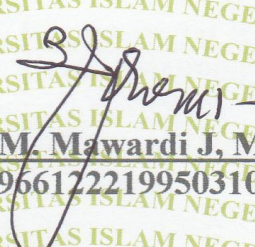
Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. MA. Achlam, MA
NIP. 195501141987031001


Hj. Mardiyah, S.Pd, M.Pd
NIP. 197112152007012020

Mengetahui
Ketua Jurusan PMI


Dr. H. M. Mawardi J, M.Si
NIP. 196612221995031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 78088

PENGESAHAN

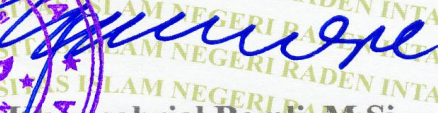
Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA BANJARMASIN KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS”**, disusun oleh: **Fiolita Nur Wulandari, NPM: 1541020008**, Jurusan: **Pengembangan Masyarakat Islam (PMD)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Kamis, 12 November 2020**

TIM DEWAN PENGUJI

- Ketua Sidang** : **Dr. H. M. Mawardi J., M.Si** 
- Sekretaris** : **Fiqih Satria, M.T.I** 
- Penguji I** : **Dr. Fariza Makmun, S.Ag., M.Sos.I** 
- Penguji II** : **Prof. Dr. H. MA. Achlami HS, MA** 
- Penguji Pendamping** : **Hj. Mardiyah, S.Pd, M.Pd** 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi




Prof. Dr. H. M. Masahrial Romli, M.Si

04091990031002

MOTTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”

(Q.S Al-Isra': 26)



KATA PENGHANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengajarkan manusia untuk selalu menggali ilmu Agama dan pengetahuan dan dengan rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus” Sholawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan umatnya.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang sangat berjasa. Untuk itu terimakasih penulis sampaikan atas bantuan berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. M. Mawardi J. M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak H. Zamhariri, S.Ag, M.Sos.I selaku Sekretaris Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. H. MA. Achlami HS. MA selaku Pembimbing I, dan Ibu_Hj. Mardiyah, S.Pd, M.Pd, selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan arahan pada penulis

6. Pihak perpustakaan Pusat dan juga Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan buku-buku referensi pada penulis.
7. Bapak Lurah Banjarmasin beserta seluruh perangkat Kelurahan.

Akhirnya ungkapan Do'a terucap dengan ikhlas, mudah-mudahan seluruh jasa baik moril maupun materil berbagai pihak, dinilai baik dan membuahkan pahala disisi Allah SWT.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Penulis

Fiolita Nur Wulandari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGHANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penulisan.....	10
F. Manfaat Penulisan.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Metode Analisis Data.....	17
BAB II EFEKTIVITAS KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
A. Efektivitas.....	22
1. Pengertian Efektivitas.....	22
2. Pendekatan Efektivitas.....	23
3. Pengukuran Efektivitas.....	24
B. Program Keluarga Harapan (PKH).....	26
1. Pengertian Program Keluarga Harapan.....	26
2. Tujuan Program Keluarga Harapan.....	27
3. Kriteria Penerima Bantuan PKH.....	28
4. Hak dan Kewajiban Peserta PKH.....	29
5. Besaran Bantuan.....	33
C. Kesejahteraan Masyarakat.....	35
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	35
2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat.....	38
3. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat.....	39
4. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam.....	40

D. Evaluasi Kebijakan.....	42
1. Pengertian Evaluasi.....	42
2. Fungsi Evaluasi Kebijakan.....	43
3. Kriteria Evaluasi Kebijakan	44
4. Pendekatan Evaluasi.....	45
BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DAN EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	
A. Profil Desa Banjarmasin.....	48
1. Sejarah Desa.....	48
2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa.....	50
3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa.....	51
4. Kondisi Sosial Budaya Desa	53
5. Kondisi Sosial Agama Desa.....	55
B. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	56
1. Penetapan Sasaran	58
2. Penetapan Lokasi	58
3. Persiapan pertemuan awal dan validasi.....	58
4. Penyaluran Bantuan	59
5. Pembentukan Kelompok.....	60
6. Pemutahiran Data.....	61
C. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).....	62
1. Efektivitas	63
2. Efiseinsi.....	64
3. Edukasi.....	65
4. Kemerataan	66
5. Responsivitas.....	67
6. Ketepatan.....	69
BAB IV ANALISI EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYRAKAT MISKIN	
A. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	71
B. Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Data Nama Lurah Banjarmasin.....	48
2. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	50
3. Data Penduduk Berdasarkan Usia.....	51
4. Data Penduduk Berdsarkan Mata Pencaharian	52
5. Data Penduduk Berdsarkan Pendidikan	53
6. Data Berdasarkan Pemeluk Agama.....	55
7. Data Tempat Ibadah.....	56



DAFTAR BAGAN

	Halaman
1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan	49



DAFTAR LAMPIRAN

1. Panduan Wawancara
2. Panduan Observasi Dan Dokumentasi
3. Surat Keputusan Tentang Judul Skripsi
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian Dari Kelurahan Banjarmasin
6. Kartu Hadir Munaqasyah
7. Kartu Konsultasi Skripsi
8. Foto Kegiatan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna judul Skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu makna dari istilah- istilah yang terdapat didalam judul Skripsi ini adalah **“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus”**.

Efektiv adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut.¹

Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris yakni *effective* yang berarti tercapainya suatu pekerjaan dan perbuatan yang direncanakan. Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, efektivitas disebut efektif apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.²

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga

¹ Badrudin, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 21

² Kartiawati. Skripsi Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari prespektif ekonomi islam (studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan). (Lampung: Institut Agama Islam Negeri raden Intan.2017). Hlm. 2

yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga salah satu program prioritas nasional yang di jadikan oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara continue.³

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁴

Dari beberapa uraian di atas, yang dimaksud efektivitas program keluarga harapan adalah suatu ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan melalui bantuan program keluarga harapan (PKH) yang diberikan kepada masyarakat miskin.

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”, sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sanskerta “catera” yang berararti payung. Dalam kontek ini kesejahteraan yang terkandung dalam arti payung adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin.⁵

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah,

³ Kementerian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), hal. 22.

⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

⁵ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012) , h. 8

pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁶

Dari beberapa istilah diatas yang maksud dalam skripsi ini tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus adalah suatu ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya melalui bantuan program keluarga harapan (PKH)

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah:

1. Program keluarga harapan (PKH) adalah bantuan dari pemerintah untuk masyarakat miskin, sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang menerima bantuan PKH, maka dari itu penulis mencoba meneliti efektivitas program keluarga harapan (PKH) apakah sudah efektif atau belum.
2. Lokasi Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat mudah diakses baik menggunakan kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat, serta tersedianya literatur yang memadai.

⁶ UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, jumlah penduduk yang banyak membuat Negara Indonesia berusaha terus membenahi diri untuk melakukan pembangunan di segala sektor, pembangunan itu untuk mengubah setiap aspek kehidupan negara dari kondisi yang ada kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Salah satu tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, adalah masalah pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya dimasyarakat Negara berkembang seperti Indonesia. Masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian dan sebagainya. Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,- /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis

Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.⁷

Permasalahan kemiskinan memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi (lost generation) di masa mendatang. Dalam upaya mengurangi kemiskinan juga perlu dilakukan pendekatan kemanusiaan yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan melalui peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, serta penyediaan jaminan dan perlindungan sosial.

Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi masalah yang disebabkan oleh kemiskinan salah satunya adalah dengan membuat kebijakan terkait pemberdayaan keluarga miskin, salah satu kebijakannya yaitu membuat Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai dicanangkan pemerintah sejak tahun 2007. Berdasarkan pada keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendalian Program

⁷ Badan Pusat Statistic, Persentase Penduduk Miskin Maret 2019

Keluarga Harapan” yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan.⁸

Program keluarga harapan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2010 Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Wakil Presiden, mulaimendorong perluasan cakupan program keluarga harapan, yang berdampak pada penyelenggaraan program yang lebih efisien dan berdampak positif bagi penduduk miskin.⁹

Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I yaitu Pro-Poor (bertumpu pada Penanggulangan Kemiskinan) di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.¹⁰

Tujuan diberlakukannya Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jangka panjang adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, dan meningkatkan kualitas

⁸ Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, No:31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007

⁹ Kementerian Sosial, Undang-undang , Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (On-line) tersedia di <https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-kesos-No112009.pdf> (diakses, 13 Januari 2020)

¹⁰Dirjen Linjamsos, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. (Padang : Kementerian Sosial RI, 2017), h.1

sumber daya manusia. Tujuan tersebut sekaligus mendukung dalam upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MGDs).¹¹

Ada lima komponen MGDs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan dasar, Kesetaraan jender, Pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan Pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun.¹²

Program Keluarga Harapan (PKH) yang digulirkan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat miskin dirasakan pula oleh masyarakat miski yang ada di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat. Masyarakat Desa Banjarmasin mayoritas masyarakatnya bermatapencarian sebagai petani, petani di Desa Banjarmasin tergolong petani yang miskin yang hanya menggarap lahan orang lain.¹³

Desa Banjarmasin memiliki luas wilayah mencapai ±297 Ha dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 2.031 jiwa, dan masyarakat pada kenyataannya masih tergolong masyarakat menengah kebawah. Hal ini terlihat dari tempat tinggal mereka yang sederhana dan tingkat pendidikan anak-anak mereka yang rata-rata masih sampai SLTP dan SMA saja.¹⁴ Melihat kenyataan

¹¹ Dirjen Linjamsos, Ibid. h. 1

¹² Dirjen Linjamsos, ibid, h.2

¹³ Susanto, Kepala Dusun 1, wawancara dengan penulis, Desa Banjarmasin, 19 Januari 2020

¹⁴ Susanto, Kepala Dusun 1, wawancara dengan penulis, Desa Banjarmasin, 19 Januari 2020

tersebut masyarakat Desa Banjarmasin kemudian di data oleh ketua Rukun Tetangga sebagai calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan digulirkan oleh pemerintah sehingga masyarakat yang masuk dalam katagori masyarakat miskin berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun setelah program tersebut berjalan dan masyarakat mendapatkan PKH, masyarakat terbuai dengan dana yang diberikan oleh pemerintah, seakan-akan pemerintah memberikan dana tersebut secara Cuma-cuma dan dapat dipakai untuk keperluan apa saja. Padahal pemerintah menyiapkan dana tersebut untuk membantu masyarakat miskin dan kelaparan serta untuk kebutuhan pendidikan anak namun hal ini diselewengkan oleh sebagian masyarakat, banyak masyarakat yang setelah mendapatkan dana PKH masyarakat membeli elektroknik baru seperti televisi, handphone, kulkas bahkan adanya yang menggunakannya untuk jalan-jalan bersama keluarga dan ketika masyarakat membutuhkan dana untuk kebutuhan seperti kebutuhan sekolah anak atau ada yang sakit masyarakat memilih berhutang kepada orang lain.¹⁵

Melihat kenyataan yang terjadi pada masyarakat tersebut pihak pendamping PKH, kepala desa, para ketua rukun tetangga beserta masyarakat yang berhak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dikumpulkan di balai desa Banjarmasin untuk dilakukan penyuluhan terkait penggunaan dana PKH agar sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan, selain itu adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh pendamping PKH untuk mencabut hak masyarakat dalam mendapatkan PKH dan digantikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

¹⁵ Susanto, Kepala Dusun 1, wawancara dengan penulis, Desa Banjarmasin, 19 Januari 2020

Setelah dilakukan penyuluhan oleh pendamping PKH, pendamping PKH mulai mengarahkan masyarakat penerima PKH agar dapat memanfaatkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk kebutuhan yang sudah ditentukan seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengoptimalkan dana yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat sehingga dana tersebut dapat bermanfaat dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.¹⁶

Melihat latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus yang berdampak pada meningkatnya kompetensi masyarakat agar dapat mengoptimalkan potensi yang mereka miliki sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Banjarmasin.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis akan merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus ?

¹⁶ Susanto, Kepala Dusun 1, wawancara dengan penulis, Desa Banjarmasin, 19 Januari 2020

2. Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus ?

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teori
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat.
 - b. Sebagai pengembangan studi ilmu pengembangan masyarakat islam di Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Menjadi bahan evaluasi bagi organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

- b. Dapat menambah wawasan pengetahuan dan sebagai sumbangan informasi bagi yang berminat mengadakan penelitian yang lebih jauh tentang pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan dalam sebuah lembaga atau organisasi.

G. Metode Penelitian

Sebelum penulis menentukan metode apa saja yang dipakai dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis kemukakan jenis dan sifat penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

a. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sebagaimana penelitian lapangan maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil data secara langsung dilapangan terkait dengan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Sasaran atau obyek penelitian dibatasi pada Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) agar data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran pembahasan. Metode penelitian ini percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang dalam interaksinya dengan situasi sosial kesejahteraan mereka.¹⁷

Berdasarkan pada penelitian kualitatif data hasil penelitian pada masyarakat Desa Banjarmasin akan disajikan dalam bentuk narasi dengan

¹⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002) h.

gaya penelitian induktif dan dianalisis dan respon-respon individu yang menjadi stakholder penelitian.

b. Sifat Penelitian.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian ini dilakukan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan menggambarkan sebagaimana adanya tanpa diiringi dengan alasan, pandangan atau analisa dari penulis itu sendiri.¹⁸

Didalam penelitian ini, penulis menggambarkan keadaan objek, yakni tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat.

2. Populasi dan Sampel.

a. Populasi.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁹ Populasi juga disebut universal, tidak lain dari pada daerah generalisasi yang di wakili oleh sampel. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan dari subjek yang diwakili oleh sampel dalam proses penelitian.

¹⁸ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Logos: Jakarta, 1997), h. 60

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), h. 173

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.²⁰

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan program keluarga harapan (PKH) di desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat sebanyak 120 orang

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari sesuatu populasi dan diteliti secara rinci.²² Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya.²³ Menurut Nana Sudjana bahwa sampel adalah wakil dari populasi.²⁴ Maka dapat dipahami bahwa sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi guna menggambarkan keadaan yang sifat-sifatnya akan diukur dan agar lebih mempermudah dalam melaksanakan penelitian.

²⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Rajawali: Jakarta, 2008), h. 161

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 57

²² Ibid, h. 162

²³ Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 57

²⁴ Nana Sudjana, *Pedoman Menyusun Skripsi, tesis dan disertasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 53

Penulis menggunakan metode non-random sampling dalam penelitian ini dengan Jenis sample *purposive sampling* yaitu, memilih sekelompok subyek yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat hubunganya dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁵

Menentukan sampel harus dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, adapun kriteria yang ditetapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh Masyarakat penerima PKH
- 2) Masyarakat penerima PKH tahap I
- 3) Masyarakat Penerima PKH yang aktif dalam setiap penyuluhan yang dilakukan setiap sebulan sekali.

Berdasarkan kriteria tersebut penulis menetapkan sampel sebanyak 8 orang masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian dan 1 orang informan yaitu pendamping PKH.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data disini digunakan untuk mendapatkan data-data yang akurat dari objek penelitian, dimana dengan mengumpulkan data yang didapat dari objek penelitian tersebut diharapkan dapat membantu penulis

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 174

dalam mencari data yang dibutuhkan didalam penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan penulis adalah:

a. Metode Observasi.

Observasi adalah pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti.²⁶ Dalam observasi ini peneliti memakai observasi non-partisipan yaitu suatu proses dimana observer tidak ikut dalam kehidupan yang diobservasi.²⁷ Maka dalam observasi nonpartisipan penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi yang penulis lakukan meliputi, pertama observasi tempat (*place*) yaitu di desa Banjarmasin, kedua observasi orang-orang (*people*) yang mendapatkan Program Keluarga Harapan, ketiga observasi kegiatan (*activity*) seperti pendampingan serta penyuluhan.

b. Metode Interview (wawancara).

Metode interview adalah proses Tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁸

Metode interview mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau

²⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 70

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 80

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op.Cit*, h. 80

pendirian secara lisan dengan seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan dengan orang tersebut.²⁹

Penulis menggunakan teknik interview dengan jenis interview bebas terpimpin yang merupakan kombinasi antara interview bebas dan terpimpin. Dalam melaksanakan interview, pewawancara menggunakan pedoman yang merupakan garis besar terkait hal-hal yang akan ditanyakan. Selanjutnya, cara bagaimana pertanyaan itu diajukan dan teknis wawancara diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara.³⁰

Dalam hal ini, interview bebas terpimpin digunakan kepada seluruh sample yang sudah penulis tentukan untuk mengetahui ide-ide, gagasan, dan juga pengalaman dari objek yang akan diteliti. Metode interview ini sangat penting untuk mendapat informasi yang dibutuhkan sehingga data-data yang akurat dalam penelitian ini dapat diperoleh, yakni efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjarmasin.

c. Metode Dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³¹

Metode ini merupakan penunjang karena untuk menunjang data-data yang diperoleh dari metode interview dan observasi. Penulis menggunakan

²⁹ Koetjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramdia Pustaka), h. 22

³⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach*, Cet. II, (Bandung : Masdar Maju, 1996), h. 128

³¹ Ibid, h. 274

metode ini agar dapat menemukan data yang berkenaan dengan profil Desa.

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis.³² Karena penelitian yang penulis bahas sifatnya deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.³³ Dalam penelitian ini analisis data yang penulis gunakan bersifat deduktif yaitu berfikir secara Makro-Mikro dengan mengurutkan masalah atau situasi sosial dari yang umum lalu dikerucutkan ke yang lebih kecil agar mudah dilihat akar permasalahannya seperti apa.

Model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

1. Tahap Reduksi Data

³²Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 280

³³Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2008), h. 35

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan.³⁴ Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data lapangan yang dilakukan secara continue yang diorientasikan secara kualitatif. Penulis melakukan pemilihan dan menelaah secara dalam keseluruhan data yang dihimpun lapangan mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Tahap Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam penelitian ini yaitu Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diketahui dengan mudah. Dan penulis dapat mengklarifikasikan topik masalah, mengkode, menyajikan data sesuai dengan data lapangan dan teori yang penulis gunakan.

3. Tahap Verifikasi Data/ Penarikan Simpulan

Tahap terakhir yang terpenting dalam penelitian ini adalah Verifikasi Data/ Penarikan Simpulan. Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian

³⁴Ibid, h. 37

peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.³⁵

a. Keabsahan Data

Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data-data tersebut. Keuntungan penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan melalui wawancara atau menanyakan kepada responden. Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan. Peneliti melakukan Triangulasi sumber dalam pencarian data, yang dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat

³⁵ Ibid., h.131

membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari peneliti, serta mengcrosscek data diluar subjek.

I. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan hal yang sangat penting dan berguna bagi sebuah penelitian. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini bukan hal yang pertama kali penulis yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Namun sudah banyak sebelumnya yang telah meneliti tentang objek penelitian-penelitian sejenisnya. Berikut merupakan beberapa kajian yang dapat penulis himpun, diantaranya sebagai berikut:

1. Ridho Diana (2018), dalam penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau)”, Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).³⁶
2. Nurul Aini (2018), dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung”.

³⁶ Ridho Diana, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau)” (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Lampung, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).³⁷

3. Asti Prichatin (2019), dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada PKH Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).³⁸

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari penelitian yang pertama yaitu membahas mengenai analisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan penulis lebih terfokus pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Efektivitas Perogram Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat, sedangkan dari penelitian yang kedua yaitu Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), dimana penelitian ini mmefokuskan pada proses pelaksanaannya saja, sedangkan dari penelitian yang ketiga yaitu Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH), meskipun terdapat kesamaan pada penelitian yang ketiga, namun fokus penelitian serta objek penelitiannya berbeda selain itu wilayah penelitiannyapun berbeda.

³⁷Nurul Aini, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung”, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2018)

³⁸Asti Prichatin, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada PKH Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2019)

BAB II

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Emerson dalam Handayani, efektivitas adalah “pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan menurut Pasolong, efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “Efek” dan digunakan dalam istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹

Kemudian menurut Sedarmayanti, efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.²

¹Kartika Febri Yuliani, “Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2km) Di Kota Bandar Lampung” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017). h. 24

² Kartika Febri Yuliani, Ibid. h. 25

2. Pendekatan Efektivitas

Lebih lanjut, Lubis dan Husseini, menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu :

- a. Pendekatan sumber (resorce approach), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (proses approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan orises internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana. Menurut Makmur, menyebutkan bahwa penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan Selanjutnya menurut Sinambela, mengemukakan bahwa masyarakat merupakan aktor penting dalam suatu proses penentu suatu kebijakan atau program pembangunan. Peran serta publik tidak hanya diartikan sebagai upaya sadar untuk melibatkan masyarakat kedalam konteks proses penentu kebijakan publik.³

^{3 3} Kartika Febri Yuliani, Ibid. h. 26

Dari tiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa efektivitas merupakan konsep yang mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai sasarannya. Selanjutnya untuk mengetahui ketercapaian suatu tujuan dalam suatu program dibutuhkan ukuran efektifitas untuk mengukur keberhasilan sebuah program.

3. Pengukuran Efektivitas

menurut Campbell dalam Stress. pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan Sasaran
- c. Kepuasan Terhadap Program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh⁴

Pendapat lain, Sugiyono dalam Budiani, menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur, ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan

⁴ Kartika Febri Yuliani, Ibid. h. 28

aktivitas organisasi. Demikian pula sebaiknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Menurut Wilcox dalam Mardikonto, Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Duncan dalam Streers, menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya

menurut Winardi, pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. Selanjutnya menurut Bohari, pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya. Siagian dalam Situmorang Dkk, menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵

B. Perogram Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Perogram Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan non tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama dalam Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial pada kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal

⁵ Kartika Febri Yuliani, Ibid. h. 30

mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dasar dan kesejahteraan sosial dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan.⁶

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.⁷

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat berbasis rumah tangga, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku

⁶ Kardi, program keluarga harapan, (on-line) <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> diakses pada tanggal 13 Januari 2020

⁷ Kardi, *Ibid.*

peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.
- b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM.
- d. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM.⁸

3. Kriteria Penerima Bantuan PKH

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan 6 tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD atau sederajat, anak SMP atau sederajat, anak SMA atau sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

⁸ TNP2K, Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2017) h. 5

Ditegaskan dalam Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3, bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.⁹

4. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini:

1) Anak Usia 0-6 Tahun:

- a) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
- b) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- c) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan

⁹ Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3

Februari dan Agustus. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

- d) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/ Early Childhood Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

2) Ibu Hamil dan Ibu Nifas:

- a) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- b) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.

b. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapacatatan seperti di bawah ini

- 1) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- 2) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka).
- 3) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
- 4) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
- 5) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas

Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.

- 6) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.

c. Lansia 70 Tahun Keatas

- 1) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
- 2) Mengikuti kegiatan sosial (day care).

d. Penyandang Disabilitas Berat

- 1) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
- 2) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (home care) Bila persyaratan di atas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara

teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota. Hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan bantuan uang non tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- b) Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- c) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.

5. Besaran Bantuan

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun. Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000,-
- b. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000,-
- c. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000,-
- d. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000,-¹⁰

¹⁰Dirjen Linjamsos, Kebijakan Program Pelaksanaa Program Keluarga Harapan, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017). h. 21

Penyaluran Bantuan adalah penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dari Rekening Pemberi Bantuan Sosial ke Rekening Penerima Bantuan Sosial : Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berupa uang, disalurkan 4 tahap dalam 1 tahun, nilai bantuan sama per keluarga (flat benefit), mekanisme tunai dan non tunai. Pembayaran bantuan dilakukan dalam dua sampai empat tahap dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan Februari–Mei–Agustus–November.

Bantuan dicairkan ke rekening KPM sebanyak 4 tahap yaitu ;

Tahap 1= Rp 500.000, Tahap 3= Rp 500.000,

Tahap 2= Rp 500.000, Tahap 4= Rp 390.000,-¹¹

Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran di masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Lembaga Pembayaran. Dana Bantuan Tunai langsung dibayarkan kepada Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) melalui rekening bank/wesel/giro online (GOL) Pengurus Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada Lembaga Pembayar dan diambil langsung oleh Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pada saat pembayaran pendamping wajib memastikan kesesuaian antara Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Kartu Identitas (KTP) serta mengumpulkan bukti pembayaran

¹¹ Dirjen Linjamsos , Ibid, h. 66

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”, sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sanskerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini kesejahteraan yang terkandung dalam arti payung adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin.¹² Sedangkan menurut Poerwodarwinto, sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup).¹³

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.¹⁴ Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.¹⁵

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan

¹² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.

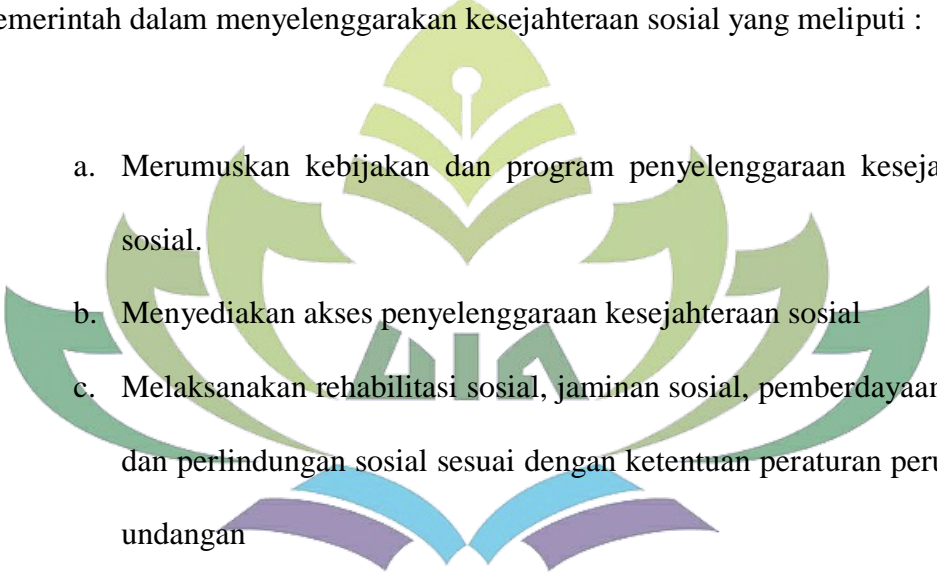
¹³ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.36

¹⁴ Badan Pusat Statistik 2007

¹⁵ Rambe, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Grafindo: 2004), h. 20

diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹⁶

Mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut dilaksanakan berbagai upaya, program dan kegiatan tersebut “Usaha Kesejahteraan Sosial” baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang No.11 Tahun 2009 bagian II pasal 25 juga menjelaskan secara tegas tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang meliputi :

- 
- a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
 - c. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
 - e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.¹⁷

Arthur Dunham dalam Sukoco mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan

¹⁶ UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2

¹⁷ Undang-undang No.11 Tahun 2009 bagian II pasal 25

kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.¹⁸

Tahapan-tahapan kesejahteraan menurut Abraham Maslow bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dan berturut-turut, seperti:

- a. Terpuhinya kebutuhan fisik atau kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.
- b. Kebutuhan akan rasa aman
- c. Kebutuhan sosial
- d. Kebutuhan akan pengakuan
- e. Terpuhinya kebutuhan aktualisasi diri.¹⁹

¹⁸ Bappenas, 2000

¹⁹ Naerul Edwin, *Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Purwakerto, 2017, h. 39

2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.²⁰

Menurut Friendlander, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjami kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak. Selain itu, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga Negara lainnya, peningkatan drajat harga diri setinggi mungkin, kesehatan berfikir dan melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak asasi seperti yang dimiliki sesamanya.²¹

Sedangkan menurut Adi fahrudin, tujuan kesejahteraan sosial ialah:

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.²²

²⁰ Rohiman Notowidagdo, Op.Cit, h. 37

²¹ Rohiman Notowidagdo, Ibid, h. 40

²² Adi Fahrudin, Op.Cit, h. 10

3. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Fungsi kesejahteraan sosial menurut Adi Fahrudin bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.²³

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain :

a. Fungsi pencegahan (Preventive)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (Curative)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitas)

²³ Adi Fahrudin, Ibid, h. 12

c. Fungsi pengembangan (Development)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangantatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi penunjang (Supportive)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. ²⁴

4. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam

Al-qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan diantara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah "al-falah" yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia. ²⁵

Secara bahasa perkataan "al-falah" berarti keberuntungan, kesuksesan dan kelestarian daam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, Ar-raghib menjelaskan bahwa perkataan al-falah dalam kosakata Al-Qur'an mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah perkataan al-falah berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan.

Al-falah dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan,

²⁴ Adi Fahrudin, Ibid, h. 13

²⁵ Usman Ismail, *Al-qur'an dan Kesejahteraa Sosial*, (Jakarta: Pt. Grafindo, 2007), h. 1

berkecukupan dan bermartabat. Al-falah dalam konteks kehidupan akhirat dibangun diatas empat penyangga yang *Pertama* kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, *Kedua* berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, *Ketiga* kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, *Keempat* pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga dapat dirumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan di akhirat.²⁶ Sebagaimana dinyatakan dalam Al-qur'an surat Al- Ankabut:64,

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٦٤

yang artinya:“dan tidaklah kehidupan dunia ini melaikan senda gurau da main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahuinya” (QS. Al- Ankabut: 64)

Kesejahteraan umat Islam merupakan tujuan poko, kesejahteraan meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.²⁷

Kesejahteraan yang dibangun Al-Qur'an berdiri diatas lima pilar utama yakni terpenuhinya kebutuhan fisik-psikologis, kebutuhan intelektual, kebutuhan emosi, kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan ini memiliki dimensi lahir batin serta terpijak pada realitas kehidupan yang menjadi landasan, motif dan perjuangan untuk mengembangkan kualitas kehidupan dunia, tetapi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik-biologis atau kehidupan

²⁶ Usman Ismail, Ibid, h. 1

²⁷ M. umer chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani press, 2000), h. 6

kebendaan yang berhenti pada dimensi waktu dan tempat.²⁸ Kualitas hidup yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan yang ditawarkan Al-Qur'an tercermin pada QS. Al-Baqarah: 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

٢٠١

artinya, “dan diantara mereka ada yang berdoa: ya tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat dan periharalah kami dari siksa neraka” (QS. Al-Baqarah: 201)

Hakekat doa tersebut menegaskan bahwa kebaikan hidup didunia yang menjadi sumber Al-falah tersebut dengan landasan iman dan ibadah merupakan modal yang investasikan untuk kehidupan akhirat karena dalam pandangan islam akhirat itu merupakan tempat untuk memetik dan dunia tempat menanam.

D. Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut Andreson dalam Winarno, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan-kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencangkup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selanjutnya Suharno, menyebutkan bahwa kegiatan evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini dapat memberikan satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah

²⁸ Usman Ismail, Ibid, h. 2

diimplementasikan dan juga dapat menjadi pintu baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya.

Menurut Sinaga, evaluasi dapat dilakukan setelah kebijakan diimplementasikan. Pada tahap ini harus diikuti dengan tahap monitoring agar perkembangan kebijakan dapat diketahui, apakah kebijakan tersebut bisa diterima oleh mayoritas warga negara atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu dampak dari suatu kegiatan kebijakan publik dan untuk menilai dan memonitoring sejauh mana keefektifan kebijakan publik.

2. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Suharno, ada 3 variabel dari fungsi evaluasi kebijakan, antara lain :

- a. Fungsi paling mendasar dari kegiatan evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan informasi valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi menangkap dan mengukur seberapa jauh ketercapaian kebutuhan dan nilai melalui nilai dan tindakan kebijakan publik.
- b. Fungsi kedua, evaluasi memberi kontribusi untuk upaya klarifikasi dan kritik atas nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi dapat memperjelas nilai dengan cara mendefinisikan tujuan dan target secara operasional.
- c. Fungsi selanjutnya, evaluasi menunjang pelaksanaan prosedur-prosedur lainnya dalam analisis kebijakan, seperti perumusan masalah, rekomendasi dan kegiatan lainnya. Evaluasi kebijakan bukanlah kegiatan yang berdiri

sendiri, akan tetapi yang terkait dengan kegiatan analisis kebijakan yang lain.

Dunn, mendefinisikan evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, antara lain:

- a. Fungsi pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu.
- b. Fungsi kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan definisikan dan operasikan tujuan dan target.

3. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut Suharno, kriteria untuk menghasilkan kinerja kebijakan sangat terkait dengan kriteria rekomendasi kebijakan. Kriteria evaluasi kebijakan dengan demikian terdiri atas 6 aspek, yaitu :

- a. Efektifitas, pada kegiatan evaluasi penekanan kriteria ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari suatu kebijakan sudah tercapai.

- b. Efisiensi, fokus dari kriteria ini adalah persoalan sumber dana, yakni seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.
- c. Edukasi, kriteria ini lebih mempersoalkan kememadaian hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan atau seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan.
- d. Kemerataan atau ekuitas, kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok sasaran dan penerima manfaat.
- e. Responsivitas, kriteria ini lebih mempersoalkan aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran, atas hasil kebijakan. Apakah hasil kebijakan yang telah dicapai telah memuaskan kebutuhan dan pilihan mereka atau sebaliknya.
- f. Ketepatan, kriteria ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran²⁹

4. Pendekatan Evaluasi

Pendekatan evaluasi menurut Dunn, antara lain :

- a. Evaluasi semu, adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode untuk menghasilkan informasi deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk

²⁹ Kartika Febri Yuliani,, Op. Cit, h. 20

menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil tersebut terhadap individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial.

b. Evaluasi formal, merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk memanfaatkan atau nilai kebijakan program.

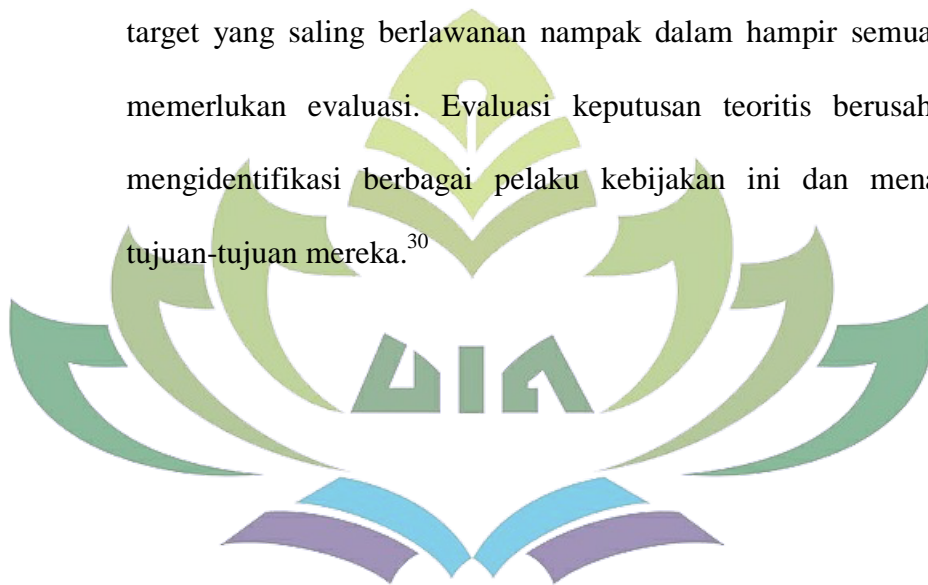
c. Evaluasi keputusan teoritis merupakan cara untuk mengatasi beberapa kekurangan dari evaluasi semu dan evaluasi formal.

1) Kurang dan tidak dimanfaatkan informasi kinerja. Sebagian besar informasi yang dihasilkan melalui evaluasi kurang digunakan atau tidak digunakan untuk memperbaiki perbuatan kebijakan. Untuk sebagian hal, evaluasi tidak cukup responsif terhadap tujuan dan target dari pihak-pihak yang mempunyai andil dalam perumusan dan implementasi kebijakan dan program.

2) Ambiguitas kinerja tujuan, banyak tujuan dan program publik yang kabur, ini berarti bahwa tujuan umum yang dapat di operasionalkan ke dalam 6 macam kriteria evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi,

kecukupan, kesamaan, responsivitas dan kelayakan. Salah satu tujuan dari evaluasi keputusan teoritis adalah untuk mengurangi kekaburan tujuan dan menciptakan konflik antar tujuan spesifik atau target.

- 3) Tujuan-tujuan yang saling bertentangan, tujuan dan target kebijakan dan program publik tidak dapat secara memuaskan diciptakan misalnya dengan memusatkan pada nilai-nilai salah satu atau beberapa pihak. Dalam kenyataan, berbagai perilaku kebijakan dengan tujuan target yang saling berlawanan nampak dalam hampir semua kondisi memerlukan evaluasi. Evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk mengidentifikasi berbagai pelaku kebijakan ini dan menampakan tujuan-tujuan mereka.³⁰



³⁰ Kartika Febri Yuliani,, Op.Cit, h. 22

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Ayub. M. Pandangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, Kendari, Unhalu Press, 2011
- Badan Pusat Statistic, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2019*
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007
- Dirjen Linjamsos, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. (Padang : Kementrian Sosial RI, 2017)
- Hotniar Siringoringo, *Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2008
- Kardi, program keluarga harapan, (on-line) <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> diakses pada tanggal 13 Januari 2020
- Kamus Besar Bahas Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2001
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach*, Bandung : Masdar Maju, 1996
- Kementrian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016),
- Kementrian Sosial, Undang-undang , Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (On-line) tersedia di <https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-kesos-No112009.pdf> (diakses, 13 Januari 2020)

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,
No:31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007
- Koetjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramdia Pustaka
- M. umer chapra, *Islam Pembangun Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani press, 2000
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali, 2008
- Naerul Edwin, *Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Purwakerto, 2017
- Nana sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung : Sinar Baru, 1998
- Nani Machendrawati, *Pengembangan Masyarakat islam*, Bandung : Rosda, 2001
- Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- Rambe, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Rajawali Grafindo: 2004
- Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Amzah, 2016
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2001
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013
- Undang-undang No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2
- Usman Ismail, *Al-qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Pt. Grafindo, 2007)
- TNP2K, Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017)

Totok Madikanto dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Logos: Jakarta, 1997),

